

# BAB I

## PENDAHULUAN

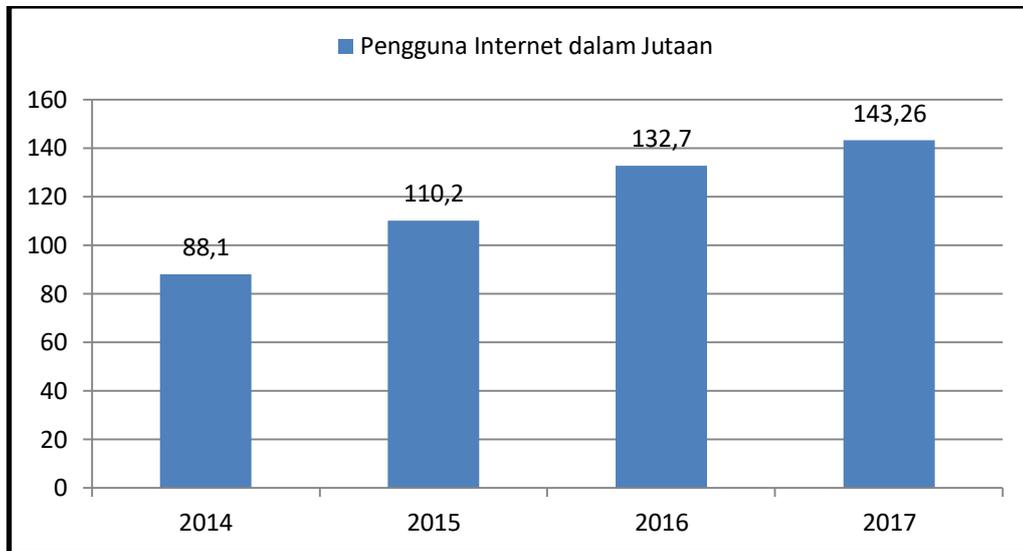
### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat menjadi hal biasa saat sekarang ini. Teknologi telah menjadi kebutuhan utama banyak masyarakat beberapa tahun belakangan yang sebelumnya bukan menjadi kebutuhan penting dalam mempermudah aktifitas sehari-hari. Dengan dukungan teknologi setiap orang biasa melakukan berbagai hal tanpa harus melakukan pekerjaan yang berat atau usaha lebih untuk mendapatkannya.

Teknologi memiliki sarana penghubung untuk menunjang fungsi teknologi yang digunakan. Salah satu sarana penghubung teknologi dalam memperoleh informasi dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta adalah melalui jaringan internet. Dengan jaringan internet, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan dari berbagai sumber yang ada di seluruh dunia tanpa mengalami kendala jarak antara pemberi dan penerima disaat membutuhkan informasi dan pelayanan.

Pemanfaatan internet oleh orang-orang disekitar sekarang sering kali kita jumpai dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Sebuah asosiasi yang menaungi penyelenggaraan internet di Indonesia, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia seperti gambar 1.1:

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Pengguna Internet**



Sumber : APJII (Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017)

Gambar 1.1 yang telah ditampilkan menggambarkan terjadinya peningkatan pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 dari 262 juta orang populasi penduduk Indonesia, 143,26 juta orang atau 54,68% merupakan pengguna internet. Karena internet merupakan sarana penghubung penggunaan teknologi, tentu dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi di masyarakat juga mengalami peningkatan.

Peningkatan pemanfaatan teknologi di masyarakat sudah selayaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama pada pelayanan publik. Karena pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik<sup>1</sup>. Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa Inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada<sup>2</sup>. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, tentu mempermudah penyelenggara pelayanan publik dalam mengupayakan terealisasinya inovasi pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sejalan dengan inovasi pelayanan publik menggunakan teknologi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengatakan, saat ini Indonesia memasuki era *Connectivity and Internet of Think*, dimana batasan ruang diterjang dan waktu dipersingkat, kemudian juga dalam tata kelola pemerintahan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-Government (Electronic Government)* adalah sebuah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

keniscayaan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penggerak utama reformasi birokrasi, menyadari betul pentingnya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di era digital menuju terwujudnya pemerintahan kelas dunia<sup>3</sup>. Berdasarkan definisi *e-Government* menurut *World Bank*, *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: *Wide Area Network*, Internet, dan *Mobile Computing* yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan<sup>4</sup>.

*E-Government* yang diselenggarakan oleh pemerintahan bertujuan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam persaingan global. Banyak hal yang bermanfaat dapat diperoleh seperti efektif dan efisien apabila pemerintah menggunakan teknologi sebagai pembantu untuk mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Bukti perhatian pemerintah terhadap penggunaan teknologi dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Salah satu konsep yang menjadi fokus dalam Inpres tersebut adalah pengembangan *information and communications technology* (ICT). Konsep inilah yang menyokong berkembangnya aplikasi *e-Government* di Indonesia<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Suara.com. 2018, 10 Juli. Kementrian PAN-RB Luncurkan Tujuh Inovasi e-Government <https://www.suara.com/news/2017/10/04/121554/kemenpan-rb-luncurkan-e-government> Diakses 25 Juni 2018 Jam 20.37

<sup>4</sup> Indrajit, *e-Government in Action* : Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai negara, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 36.

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih fokus dalam pelaksanaan *e-Government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, bahwa pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah melihat penerapan teknologi dalam melaksanakan pemerintahan merupakan suatu yang penting, sehingga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mendukung terciptanya langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah pusat maupun daerah agar terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional<sup>6</sup>.

Menpan-RB mengatakan berjanji mulai menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau *e-Government* secara nasional tahun 2018. Adanya sistem pemerintahan secara nasional ini diyakini bisa menghadirkan efisiensi belanja *information technology* (IT) yang dikeluarkan selama ini. Sistem yang sudah ada di daerah akan direplikasi untuk penerapan *e-Government* secara nasional<sup>7</sup>.

Penerapan *e-Government* pada pemerintah daerah bukanlah sebuah hal baru, tetapi sudah dilakukan beberapa tahun belakang. Pada saat ini setiap

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*

<sup>7</sup> Detik.com. 2018, 3 April. Menpan RB : Penerapan e-Government Nasional Mulai Tahun Ini <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3950802/menpan-rb--penerapan-e-government-nasional-mulai-tahun-ini> Diakses 25 Juni 2018 Jam 17.08

pemerintahan di daerah tidak terkecuali di Sumatera Barat pada umumnya telah memiliki portal-portal pemerintahan sebagai bentuk aplikasi *e-Government*. Seperti yang pernah disampaikan oleh penelitian terdahulu, penerapan *e-Government* di Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan *e-Government* untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang diinginkan oleh masyarakat. *E-Government* Pemerintah Kota Padang terdiri dari 5 (lima) sub bagian yang dikelola oleh beberapa unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bentuk aplikasi *e-Government* tersebut berupa portal web <http://www.padang.go.id>, Sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem Administrasi Kependudukan (SIKAD) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)<sup>8</sup>.

*E-Government* pada tingkat pemerintahan terendah seperti di kelurahan dan nagari/desa juga telah menerapkannya. Penerapan *e-Government* di kelurahan berupa program e-Kelurahan. E-Kelurahan di Sumatera Barat telah diterapkan di seluruh Kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Pemerintah Kota Padang Panjang meluncurkan program e-Kelurahan untuk memudahkan masyarakat dalam berurusan administrasi pemerintahan. E-Kelurahan Kota Padang Panjang dapat diakses melalui “E–Pemerintahan” di internet lalu *sign in*, dan memilih opsi Sumatera Barat, Kota Padang Panjang, lalu memilih kelurahannya, maka kita bisa mengurus perizinan dan surat menyurat yang tertera pada aplikasi tersebut<sup>9</sup>. Salah

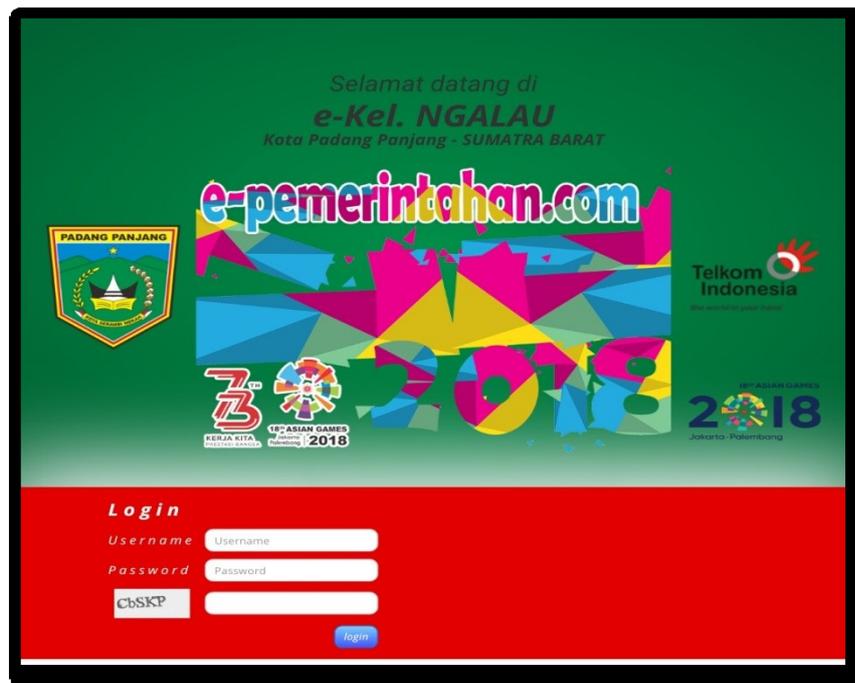
---

<sup>8</sup> Fajri Adha, “*Pengelolaan Portal Pemerintah Kota Padang*” Skripsi Jurnal Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas Padang, 2013.

<sup>9</sup> Haluan.com, 2016, 25 juli. Aplikasi e-Kelurahan hadir di Padang Panjang <https://www.harianhaluan.com/news/detail/57251/aplikasi-ekelurahan-hadir-di-padang-panjang> Diakses 18 September 2018 Jam 3.06

satu kelurahan yang menerapkan e-Kelurahan di Kota Padang Panjang yakni Kelurahan Ngalau, memiliki tampilan awal e-Kelurahan seperti gambar 1.2:

**Gambar 1.2**  
**Tampilan Awal E-Kelurahan Ngalau**



Sumber : E-Pemerintah.com (E-Kelurahan Ngalau) Tahun 2018

Tampilan awal dari e-Kelurahan terdapat pembatasan akses melalui menu *sign in*, sehingga tidak semua orang dapat masuk ke dalam e-Kelurahan tanpa memiliki *username* dan *password*. Selain itu, terdapat logo Telkom Indonesia di dalam tampilan awal dari e-Kelurahan. Dikarenakan e-Kelurahan merupakan bagian dari program *SmartCity* Nusantara yang dirancang oleh Telkom Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penerapannya. Berikut merupakan bagian-bagian dari program *SmartCity* Nusantara Telkom Indonesia seperti gambar 1.3:

Gambar 1.3  
Program *SmartCity* Nusantara Telkom Indonesia



Sumber : Slide Seminar Telkom Indonesia Wilayah Sumatera Barat 2017

Penerapan e-Kelurahan merupakan pelaksanaan dari *Smart Government* dari program *SmartCity* Nusantara Telkom Indonesia. Sehingga e-Kelurahan bukan merupakan inovasi pelayanan publik berbasis *web* yang berasal dari inisiatif kelurahan manapun kelurahan lain yang menerapkan e-Kelurahan.

Peneliti menemukan inovasi pelayanan publik berbasis *web* yang dibangun melalui inisiatif pemerintah nagari di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang merupakan satu dari tujuh puluh sembilan nagari

yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data statistik tahun 2015 luas wilayah Nagari adalah 1.387 Ha<sup>2</sup> atau 13,87 Km<sup>2</sup>, yang berarti 0,41 persen dari daratan Kabupaten Lima Puluh Kota yang luasnya mencapai 3.354,30 Km<sup>2</sup>. Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang terdiri dari 6 Jorong. Batas-batas administratif Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sicincin dan Kelurahan Air Tabit (Kota Payakumbuh), sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Malintang (Gunung Sago), sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Kamuyang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Situjuh Gadang dan Kelurahan Aur Kuning (Kota Payakumbuh)<sup>10</sup>.

Inovasi di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang berbentuk Standar Pelayanan Minimal berbasis digital dan Informasi Berbasis *Web* (OpenSID) yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari. OpenSID adalah sebuah sistem informasi desa yang sengaja dirancang terbuka dan dapat dikembangkan secara bersama-sama oleh komunitas Peduli Sistem Informasi Desa (SID). OpenSID dapat memudahkan pemerintah nagari dalam segala hal, karena fitur yang tersedia dalam OpenSID sudah terbilang sangat lengkap<sup>11</sup>. Dalam bahasa sistem informatika, pembuatan SID ini dibuat dengan menggunakan aplikasi *open source* yaitu OpenSID. Arsitektur dimulai dari *user* dengan memasukkan alamat *http*, selanjutnya akan masuk pada layer *interface*. Pada layer *interface* ini terdapat ketika user masuk ke *web browser*. Setelah masuk, dimana pada layer ini

<sup>10</sup> Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Profil Nagari <https://tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id/first/artikel/123> Diakses 29 Juni 2018 Jam 18.25

<sup>11</sup> Peran dan Manfaat OpenSID <https://github.com/OpenSID/OpenSID/wiki/Peran-dan-Manfaat-Sistem-Informasi-Desa> Diakses 29 Juni 2018 Jam 18.44

terdapat bahasa program untuk memperbaiki tampilan *web* yaitu *Pustaka JavaScript* (Jquery), *Hypertext Markup Language* (HTML), dan *Cascading Style Sheet* (CSS). Sementara untuk inti dalam *web* dibuat dengan menggunakan bahasa *Hypertext Preprocessor* (PHP) dengan menggunakan Apache (HTTP) sebagai server. Bagian database akan digunakan Sistem Manajemen Berbasis Data (MySQL)<sup>12</sup>.

SID yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat nagari baik secara internal maupun eksternal memerlukan tidak hanya dorongan yang bersifat *top down*. Pengelolaan SID yang efektif tentu dimulai dari harapan bahwasanya SID akan membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan dilakukan sendiri oleh masyarakat<sup>13</sup>. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Roni Putra masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang:

“...*web* menjadi sangat penting untuk hari ini, karena *web* bisa menjadi miniatur nagari atau sebagai perpanjangan tangan nagari untuk memberikan informasi nagari kepada perantau. Karena masyarakat nagari sekarang ini banyak yang berada di rantau...”  
(Wawancara dengan Roni Putra sebagai masyarakat Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tanggal 19 November 2018 di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang).

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, sudah sepatutnya nagari menerapkan OpenSID. Karena pada dasarnya pemanfaatan teknologi yang terhubung dengan internet, dapat menghilangkan bermasalah kondisi jarak antara

<sup>12</sup> Fahrur Rozi dan Tomi Listiawan, Pengembangan *Website* Dan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Tulungagung, *Jurnal JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Online*, 2, 2017, hlm. 109

<sup>13</sup> Nunik Maharani Hartoyo dan Ika Merdekawati, Citalinuabdi: Upaya Membangun Sistem Informasi Desa Yang Bermakna, *jurnal Komunikasi Online*, 1, 2016, hlm. 52

pemerintah dan masyarakatnya. Dengan adanya akses informasi yang dapat diterima oleh perantau, perantau juga memiliki peran untuk pembangunan nagari.

Launcing OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang ini dihadiri oleh Bupati Irfendi Arbi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Setempat, dan unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) pada hari Selasa, 27 Februari 2018. Bupati Irfendi Arbi mengapresiasi inovasi nagari dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima serta informasi akurat melalui aplikasi OpenSID melalui pelayanan berbasis digital dan media informasi publik berbasis *web*. Media aplikasi ini juga sebagai salah satu pendukung promosi obyek wisata baru di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota senantiasa mengapresiasi dan mendukung upaya nagari dalam melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Apresiasi juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari<sup>14</sup>.

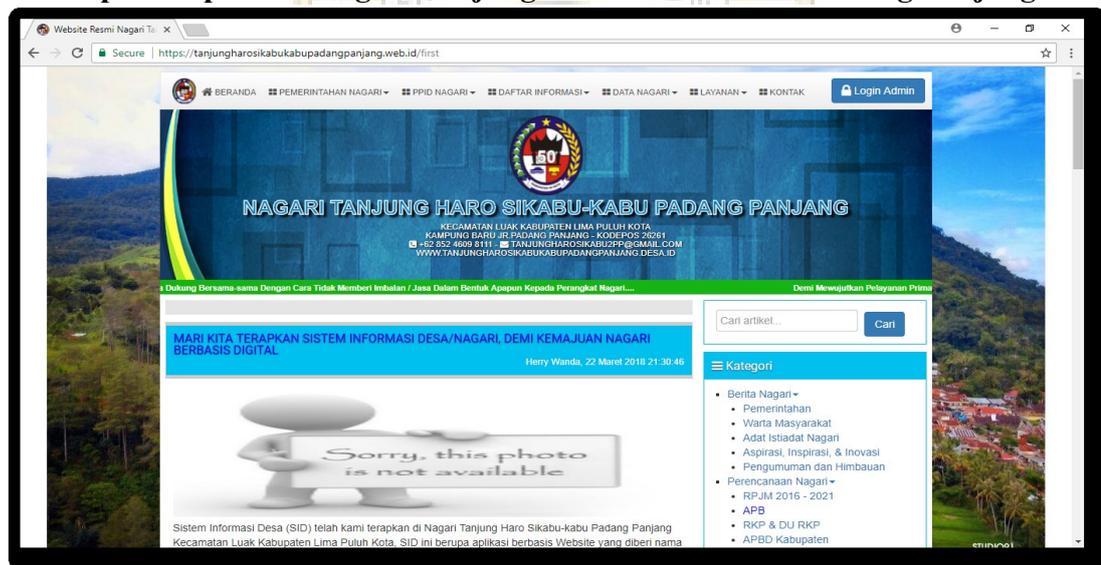
*Web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diakses melalui domain <https://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id/>. Masyarakat bisa mengakses informasi Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang secara *uptodate*. *Web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang memiliki *background* penampakan alam dan pemukiman wilayah Tanjung Haro

<sup>14</sup> Kabupaten Lima Puluh Kota . Launcing Standar Pelayanan Minimal Digital dan Media Informasi Publik Berbasis *Website* <http://www.limapuluhkotakab.go.id/berita-launching-standar-pelayanan-minimal-digital-dan-media-informasi-publik-berbasis-website.html> Diakses 8 Juli 2018 Jam 21.43

Sikabu-kabu Padang Panjang yang dilihat dari atas. Pada bagian atas situs *web* terdapat menu-menu yang dapat di akses oleh pengguna atau masyarakat dan (login admin) yang di peruntukan untuk pengelola *web*. Selanjutnya terdapat gambar lambang Kabupaten Lima Puluh Kota dan nama Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Pada bagian kanan bawah terdapat kategori yang berisikan informasi-informasi tentang Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut ini:

**Gambar 1.4**

**Tampilan OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang**



Sumber: [www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id](http://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id) Tahun 2018

Dalam mengoperasikan *web* OpenSID, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang mempercayakan operator nagari sebagai perangkat nagari yang menginput data ke dalam *web* OpenSID dan mengelola setiap harinya sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Operator Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang:

“...selama ini, *web* OpenSID di nagari yang menjalankan dan mengimput data ke dalam *web* merupakan tugas abang sebagai operator nagari yang ditugaskan wali nagari untuk menjalankannya, termasuk mendesain gambar yang di masukkan ke dalam *web* OpenSID tersebut...” (Wawancara dengan Herry Wanda A.Md.Kom sebagai Operator Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tanggal 19 November 2018 di Kantor Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, yang bertugas dalam pengoperasian dan bertanggungjawab terhadap *web* OpenSID nagari merupakan Operator nagari yang bernama Herry Wanda A.Md.Kom. Operator nagari merupakan lulusan D.3 Management informatika dan Komputer yang dianggap mengerti tentang komputer dan pengelolaan *web* yang ada di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.

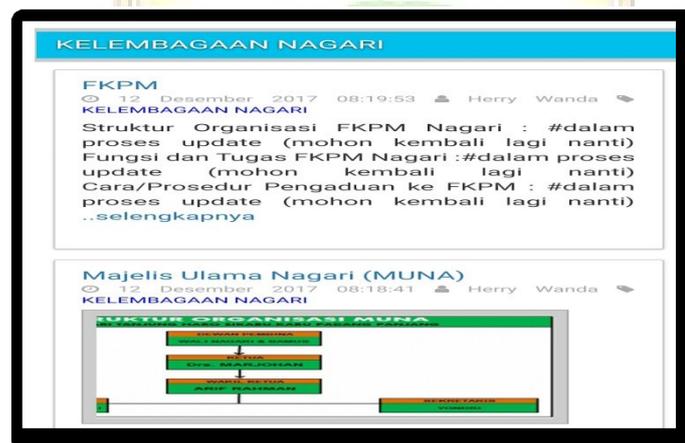
Selanjutnya, dalam membangun situs *web* sektor publik, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah isi yang disampaikan di dalam situs *web*. Menurut David Griffi (2007), membangun situs *web* memiliki beberapa dimensi dan indikator yang membahas tentang pendekatan inisiatif dan kemajuan. Secara umum, dimensi analisis situs *web* memeriksa kemampuan untuk menyediakan layanan publik elektronik menggunakan saluran baru. Empat dimensi analisis situs *web* yang digunakan adalah konten, partisipasi, manajemen dan gaya. Yang pertama, berkaitan dengan jenis informasi yang disediakan organisasi di *web*, dan tingkat interaksi mereka dengan masyarakat. Yang kedua, menyangkut niat untuk mempromosikan keterlibatan publik antara lembaga politik lokal dan masyarakat yang menggunakan situs *web*. Yang ketiga, menyatakan perhatian terhadap pemeliharaan, arah dan alamat situs *web* presentasi. Keempat, jenis alat yang digunakan untuk memfasilitasi akses konten<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> David Griffin, *Developments In E-Government*, IOS Press, Netherlands, 2007, hlm. 49.

Adapun mengenai OpenSID di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dalam menyediakan informasi yang disajikan ke situs *web*, menurut teori tentang dimensi konten dijelaskan terdapat kategori informasi yang lebih berorientasi ke masyarakat dalam pelayanan dan fungsi berdasarkan area, organisasi dan terfokus pada kelompok penduduk. Dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan lembaga nagari dalam situs *web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dapat dilihat pada gambar 1.5:

**Gambar 1.5**  
**Informasi Lembaga-lembaga di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang**



Sumber: [www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id](http://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id) Tahun 2018

Dari gambar 1.5, terdapat informasi lembaga-lembaga yang berada di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Informasi yang disajikan lengkap dengan struktur lembaga dan fungsi beserta tugas yang melekat pada lembaga. Secara teoritis yang dijelaskan dalam indikator lembaga-lembaga dan organisasi internal, menjelaskan indikator lembaga-lembaga dan organisasi internal dapat mengacu pada aspek politik dan administrasi dari organisasi seperti

anggaran, struktur pemerintah daerah, bagan alur organisasi, sumber daya manusia, peraturan internal dan eksternal.

Berikutnya, informasi yang disajikan di situs *web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang adalah informasi mengenai kependudukan. Pemerintah Nagari melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk dapat memperoleh data kependudukan yang lengkap dan akurat. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Operator Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang:

“...dalam memasukan data ke dalam situs *web*, seperti data kependudukan nagari, pemerintah nagari meminta langsung ke Disdukcapil data tentang Kependudukan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang secara lengkap...” ( Wawancara dengan Herry Wanda A.Md.Kom sebagai Operator Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tanggal 23 Maret 2018 di Kantor Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pemerintah nagari menyediakan informasi-informasi mengenai kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Secara teoritis dalam item layanan dan fungsi kelompok penduduk, menggunakan informasi kelompok penduduk adalah cara lain untuk menyajikan informasi dan pelayanan di situs *web*.

Selanjutnya, Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang selalu menyediakan kontak nagari pada setiap publikasi yang disampaikan kepada masyarakat baik melalui spanduk maupun situs *web* (*offline* atau *online*). Secara teoritis, pemerintah nagari memberikan sarana partisipasi masyarakat agar dapat merespon setiap kegiatan yang dilakukan nagari. Sejalan

dengan itu, menurut dimensi partisipasi memiliki pengertian informasi, interaksi dan partisipasi aktif yang tersedia. Contoh publikasi yang dilakukan Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dapat dilihat pada gambar 1.6:

Gambar 1.6

Contoh Publikasi Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang secara Online dan Offline



Sumber: [www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id](http://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id) dan Hasil Olahan Peneliti 2018

Dari gambar 1.6, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dalam melakukan publikasi, menyediakan kontak dalam berbagai bentuk saluran komunikasi seperti telepon atau media sosial yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berpartisipasi. Secara teoritis dalam indikator alat umpan balik menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan berbagai aplikasi untuk memperkenalkan mereka dalam proses kebijakan dan informasi merupakan prasyarat untuk partisipasi. Hasil dari partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan OpenSID di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dapat dilihat dari gambar 1.7:

**Gambar 1.7**  
**Pengunjung *Web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang**



Sumber: [www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id](http://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id) Tahun 2018

Dari gambar 1.7, dapat disimpulkan bahwa terdapat ratusan masyarakat yang memanfaatkan OpenSID setiap harinya yang menandakan partisipasi masyarakat terhadap OpenSID. Selain itu, dengan dimanfaatkannya *web* OpenSID oleh masyarakat, tentu *web* OpenSID memiliki pengaruh dalam hubungan pemerintahan nagari dan masyarakatnya.

Selain proses partisipasi, situs *web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang juga memasukkan situs *web* dari lembaga pemerintahan lain dan organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan dengan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Kotak-kontak lembaga pemerintahan lain dan organisasi masyarakat dapat dilihat dari gambar 1.8:

Gambar 1.8

Situs *Web* Lembaga Pemerintahan dan Organisasi Masyarakat

Sumber: [www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id](http://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id) Tahun 2018

Dari gambar 1.8, masyarakat juga dapat mengakses situs *web* dari lembaga pemerintahan lain dan organisasi masyarakat yang memiliki kepentingan dengan nagari. Dengan disediakanya kontak lembaga pemerintahan lain dan organisasi masyarakat, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dengan mengunjungi situs *web* lainnya. Secara teoritis, dalam indikator informasi relasional menjelaskan bahwa situs *web* menyediakan kontak dengan administrasi publik terdekat, tokoh atau aparatur, lebih jauh untuk interaksi dengan tingkat pemerintahan lainnya.

Berikutnya dalam dimensi manajemen, situs *web* dianggap sebagai sistem baru untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat, perlu dipertahankan dan disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan baru masyarakat. Berikut ini adalah Informasi yang disajikan secara *uptodate* oleh Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang yang dapat dilihat dari gambar 1.9:

Gambar 1.9

Contoh Informasi dalam Situs *Web* OpenSID

HARI	JAM	JORONG
1. Minggu/ 08-10-2018	09.00	Lakuak Dame
2. Selasa/ 09-10-2018	09.00	Bukik Kenduang
3. Rabu/ 10-10-2018	09.00	TJ Haro Utara
4. Kamis/ 11-10-2018	09.00	TJ Haro Selatan
5. Senin/ 15-10-2018	09.00	Sikabu-kabu
6. Selasa/ 16-10-2018	09.00	Padang Panjang

Sumber: [www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id](http://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id) Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.9, dalam pelaksanaan pemberian informasi kepada masyarakat, Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang selalu memperbaharui informasi. Hal yang seringkali dianggap tidak penting adalah domain *web*. Pelaksanaan OpenSID di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dari awal pelaksanaan mengalami perubahan pada domain *web* yang terlihat pada gambar 1.10:

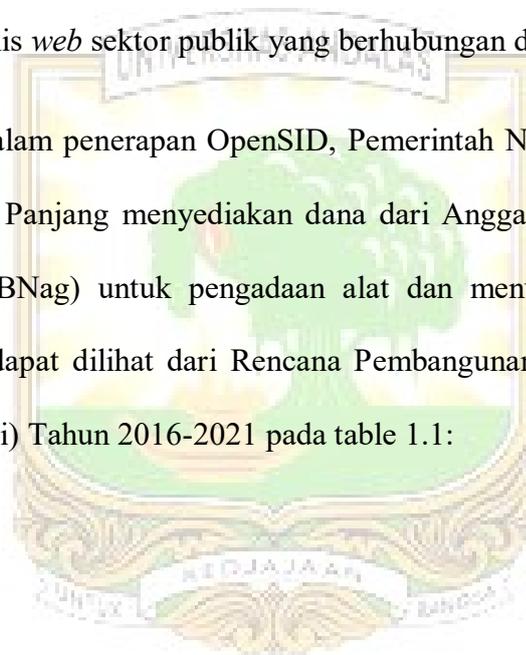
Gambar 1.10

Perubahan Domain Situs *Web* OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2018

Dari gambar 1.10, dalam proses pelaksanaan OpenSID di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang dapat dilihat perbedaan domain *web* karena perubahan yang dilakukan oleh nagari pada domain *web*. Pada awal penerapan penggunaan domain *web*, domain *web* nagari yang digunakan adalah <https://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.web.id/> kemudian berubah menjadi <https://www.tanjungharosikabukabupadangpanjang.desa.id/>. Secara teoritis, dalam indikator manajemen domain dijelaskan penggunaan .com, .org, .net, .info, dll, hal ini dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mengelompokkan jenis *web* sektor publik yang berhubungan dengan organisasi.

Berikutnya dalam penerapan OpenSID, Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) untuk pengadaan alat dan menunjang pelaksanaan OpenSID di nagari dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2016-2021 pada table 1.1:



Tabel 1.1

## RPJM Pengelolaan Informasi Nagari dalam Pelaksanaan OpenSID

Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Perkiraan Waktu Pelaksanaan							Perkiraan Biaya dan Sumber Penerimaan
Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>
Pengelolaan Informasi Nagari	Penyediaan Website Resmi Nagari	STP	1 paket	Tersedianya pelayanan publik e-gov IT Based	-	√	√	√	√	√	√	Rp. 7.000.000
	Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari	STP	1 paket	Tercapainya penyediaan mutu layanan yang berbasis standar pelayanan minimal	-	√	√	√	√	√	√	Rp. 15.000.000
	Penyediaan Profil dan Peta Satelit Nagari dan Jorong Berbasis IT	STP	1 paket	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	-	√	√	√	√	√	√	Rp. 1.000.000
	Pembangunan	STP	1	Tersedianya	-	√	√	√	√	√	√	Rp.

	data / Informasi / Statistik Nagari Berbasis IT		paket	pelayanan publik <i>e-gov IT Based</i>								15.000.000
	Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Birokrasi	STP	1 paket	Tersedianya pelayanan publik <i>e-gov IT Based</i>	-	√	√	√	√	√	√	Rp. 36.000.000
	Penyediaan Sarana Informasi Publik	STP	1 paket	Terwujudnya <i>open government</i>	-	√	√	√	√	√	√	Rp. 103.200.000

Sumber: RPJM Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang 2016-2021.



Sesuai dengan RPJM-Nagari, OpenSID merupakan program yang baru di anggarkan 2017 dengan menggunakan *e-Government* yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan nagari. Dalam pelaksanaan program tersebut juga memerlukan dana yang tidak sedikit yaitu mencapai dana RP 177.200.000 untuk penyediaan sarana dan prasarana OpenSID Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. Secara teoritis, penggunaan anggaran untuk memenuhi ketersediaan jenis alat yang digunakan untuk memfasilitasi akses konten. Untuk penyerapan APBNag yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang terhadap pemanfaatan OpenSID tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.2:

**Tabel 1.2**  
**Penyerapan DANA DESA, DAUN, DAK, PAN PHBL, dll dalam pemanfaatan OpenSID Tahun 2018**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Listrik, Air, dan Fax/Internet	Rp. 11.120.000	Rp. 10.554.758	Rp. 565.242
2	Belanja Modal Komputer	Rp. 11.500.000	Rp. 10.650.500	Rp. 849.500
3	<i>Hosting Internet</i>	Rp. 2.000.000	Rp. 1.290.000	Rp. 710.000
4	<i>Launching SPM</i>	Rp. 6.564.900	Rp. 6.056.400	Rp. 508.500
5	Profil Nagari	Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000	-
Jumlah		Rp. 53.684.900	Rp. 51.051.658	Rp. 2.633.242

*Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2019.*

Berdasarkan tabel 1.2, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam mempersiapkan pemanfaatan OpenSID berupa belanja komputer, *hosting internet*, *launching SPM*, Profil Nagari dan Penyediaan Layanan Internet. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersumber dari anggaran APBNag Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang.

Jadi, inovasi pelayanan publik dibutuhkan saat sekarang karena perubahan pola interaksi masyarakat yang disebabkan penggunaan teknologi yang terhubung dengan internet. Perubahan ini direspon oleh pemerintah dengan penggunaan *e-Government* yang dapat menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, dengan menggunakan *e-Government* waktu dan jarak tidak lagi menjadi masalah dalam memperoleh pelayanan. Dalam membangun *e-Government*, pemerintah harus memenuhi beberapa hal agar penerapannya sesuai dengan sektor publik. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas bagaimana analisis pemanfaatan *web* OpenSID dalam peningkatan pelayanan publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Pemanfaatan *Web* OpenSID dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Mendeskripsikan Analisis Pemanfaatan *Web* OpenSID dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai Analisis Pemanfaatan *Web* OpenSID dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada waktu kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang analisis situs *web* sektor publik.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai analisis situs *web* sektor publik.